

Adapun saran yang ditujukan kepada BPN sebagai masukan untuk penyempurnaan SIG ke depannya adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya BPN melakukan peninjauan kembali atas pengoperasian SIG dengan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sistem maupun jaringan guna memperbaiki kesalahan-kesalahan teknis agar masyarakat tidak terus menerus mengalami kendala saat mengakses Peta Bidang Tanah maupun Aplikasi Sentuh Tanahku.
2. Hendaknya BPN segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan SIG, tujuan SIG, serta keunggulannya agar masyarakat dapat lebih paham, mengerti, dan tertarik menggunakan SIG. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan SIG dalam masyarakat di samping dapat membantu mengurangi tugas BPN dalam hal melakukan pengecekan sertipikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Aminuddin Salle. Abrar Saleng. A. Suriyaman A. Mustari Pide. Farida Patittingi. Sri Susyanti Nur. Kahar Lahae. 2010. Bahan Ajar *Hukum Agraria*. AS Publishing. Makassar.

- Arba. 2018. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bernhard Limbong. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Pustaka Margaretha. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Kedua Belas, Edisi Revisi. Djambatan. Jakarta.
- Darwin Ginting. 2010. *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agrinisnis*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono. 2008. *Tanah dalam Perspektif hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas. Jakarta.
- . 2009. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi (Edisi Revisi)*. Kompas, Jakarta.
- Mohammad Machfud Zarqoni. 2015. *Hak Atas Tanah*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nia Kurniati. 2016. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan : Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. Refika Aditama. Bandung.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sahnan. 2018. *Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi)*. Setara Press. Malang.
- Saragih Alamsyah. 2012. *Pengecualian Informasi di Bidang Publik Negara*. Sekretariat Informasi Pusat.
- Supriadi. 2018. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Kencana. Jakarta.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media Grup. Jakarta.

Karya Ilmiah :

Christofer Apriano Mango, 2019. *Ringkasan Skripsi: Pembuatan Sistem Informasi Geografis Peta Bidang Tanah Berbasis Web Mapping*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Malang.

Fahmi Charish Mustofa. *Paper : Pengembangan Sistem Informasi Spasial Lingkungan Badan Pertanahan Nasional*. Departemen Teknik Goedesi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Haedar Akib, 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Adminitrasi Publik. Jurnal Administrasi Politik, Volume 1 No. 1 Tahun 2010, Universitas Negeri Makassar.

I Komang Adi Paramarta, 2013. *Sistem Informasi Geografis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Berbasis Web*. Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI), Volume 2, Nomor 3, Desember 2013, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.

Mira Novana Ardani. 2019. *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Tanah untuk Menunjang Pelaksanaan, Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional*. Jurnal Administrative Lav & Governance Jurnal, Vol. 2 Issue 3, Agustus 2019. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Muhammad Ilham Arisaputra. 2011. *Status Kepemilikan dan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan Hidup Masyarakat Adat*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol. 19 Nomor 4, Desember 2011, Universitas Hasanuddin, Makassar.

_____, dkk. 2017. *Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29 Nomor 2, Juni 2017. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prahasta dalam Budi Santosa, dkk. 2014. *Sistem Informasi Geografis Penataan Ruang dan Bangunan Berbasis Web Di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak*. Jurnal Telematika, Vol. 10 No. 2, Januari 2014. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Rakhmat Wiwin Hisbullah. Faridah Patittingi. Zulkifli Aspan. "Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik". Madani Legal Review. Vol. 2 No. 1 Juni 2018. Fakultas Hukum Unhas. Makassar.

Sri Susyanti Nur. "Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah". Hasanuddin Law Review. Vol. 1

No. 1 . April 2015. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Makassar.

Sumber Daring :

Astrid Debora. 2016. *Status Informasi Pertanahan Di Rezim Keterbukaan Informasi Publik* (disampaikan pada FGD Informasi Publik pada Dokumen Pertanahan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat). Sumber : <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Status-Informasi-Pertanahan-di-Rezim-Keterbukaan-Informasi.pdf> diakses tanggal 1 Juli 2019.

Badan Pertanahan Nasional. <https://www.atrbpn.go.id/Layanan-Publik/APLIKASI-SENTUH-TANAHKU> diakses tanggal 3 Juli 2019.

_____, <https://www.atrbpn.go.id/Beranda/peran-penting-fungsi-pengendalian-pemanfaatan-ruang-dan-penguasaan-tanah-77441> diakses tanggal 1 Juli 2019.

_____, <http://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/1030> diakses tanggal 5 September 2019.

Media Tata Ruang, <http://mediatataruang.com/lakukan-audit-di-sulsel-kementerian-atr-temukan-3-daerah-melanggar-tata-ruang/> diakses tanggal 3 Juli 2019.

Supyan Umar, <https://makassar.sindonews.com/read/14179/1/konflik-masalah-lahan-tinggi-sulsel-darurat-agraria-1537589345> diakses tanggal 3 Juli 2019.

<https://bekasilautproperty.com/hari-agraria-tata-ruang-nasional-2018-wali-kota-gandeng-bpn/4848/> diakses tanggal 1 Juli 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional diakses tanggal 28 April 2019.